

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KURIKULUM MERDEKA PADA SEKOLAH PENGGERAK TINGKAT SMA DI KABUPATEN ROKAN HILIR

SYNERGY BETWEEN THE INDONESIAN ARMY (TNI AD) AND THE CITY GOVERNMENT IN THE IMPLEMENTATION OF THE INTEGRATED MILITARY OPERATION (TMMD) PROGRAM IN PEKANBARU CITY

Sumartono¹, Febri Yuliani², Zulkarnaini³

^{1,2} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Riau, Indonesia

E-mail: sumartonodaffaprasetyo@gmail.com

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan kurikulum merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir. Serta untuk mengetahui Hambatan dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan analisis Grindle yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Lokasi penelitian adalah SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud. Informan penelitian berjumlah 10 orang. Teknik pengumpulan data adalah dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Rokan Hilir belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan Kepmendikbudristek RI No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran karena pelaksanaan kurikulum tersebut baru diimplementasikan dalam kurun waktu 2 tahun terakhir. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kurikulum merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir adalah Kurangnya sumber daya manusia yaitu Guru Penggerak yang ada pada sekolah sehingga implementasi tidak dapat berjalan maksimal. Masih minimnya pengetahuan dan literasi guru-guru dalam memahami dan menggunakan pembelajaran berbasis digitalisasi. Fasilitas sekolah yang masih minim, seperti masih kurangnya ruang laboratorium, akses internet juga menjadi kendala dalam pelaksanaan kurikulum.

Kata Kunci: Implementasi, Kebijakan, Kurikulum Merdeka

Abstract: This research aims to determine the implementation of the independent curriculum policy at SMA Level Driving Schools in Rokan Hilir Regency. As well as to find out the obstacles in implementing the independent curriculum at SMA Level Driving Schools in Rokan Hilir Regency. This type of research is descriptive qualitative with Grindle analysis consisting of policy content and implementation environment. The research locations are SMAN 1 Bagan Sinembah and SMAN 2 Pujud. There were 10 research informants. Data collection techniques are by observation, interviews and documentation. The results of this research indicate that the implementation of the Independent Curriculum Policy at High School Level Driving Schools in Rokan Hilir has not yet been fully implemented in accordance with the Republic of Indonesia Minister of Education and Culture Decree No. 56/M/2022 concerning Guidelines for Implementing Curriculum in the Context of Learning Recovery because the implementation of the curriculum has only been implemented within 2 years. final. The obstacles that occur in implementing the independent curriculum at SMA Level Driving Schools in Rokan Hilir Regency are the lack of human resources, namely Driving Teachers at the school so that implementation cannot run optimally. There is still a lack of knowledge and literacy among teachers in understanding and using digitalization-based learning. School facilities are still minimal, such as a lack of laboratory space, and internet access are also obstacles in implementing the curriculum.

Keywords: Implementation, Policy, Independent Curriculum

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 telah memberikan dampak yang signifikan terhadap sistem pendidikan di Indonesia, memaksa adanya adaptasi cepat terhadap cara pembelajaran yang baru. Salah satu respons pemerintah adalah melalui implementasi Kurikulum Merdeka pada sekolah-sekolah, termasuk di Kabupaten Rokan Hilir. Kurikulum Merdeka ini diinisiasi untuk mengatasi krisis belajar yang semakin parah akibat pandemi, dengan menyederhanakan kurikulum nasional dan fokus pada kompetensi esensial serta prasyarat untuk kelanjutan pembelajaran.

Namun, implementasi kurikulum ini menghadapi tantangan serius terutama terkait kesenjangan akses digital antara daerah perkotaan dan pedesaan, serta ketimpangan hasil pembelajaran antara siswa dari latar belakang sosial ekonomi yang berbeda. Studi menunjukkan bahwa siswa dengan akses terbatas terhadap teknologi digital cenderung mengalami kesenjangan pembelajaran yang lebih besar, mengakibatkan risiko mereka tertinggal dalam proses pembelajaran selama pandemi ini.

Setelah hampir satu tahun ajaran berjalan, Kemendikbud melakukan evaluasi terhadap implementasi kurikulum darurat. Hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa siswa yang menggunakan kurikulum darurat memperoleh hasil asesmen yang lebih baik dibandingkan dengan pengguna Kurikulum 2013 secara keseluruhan, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi mereka. Penggunaan kurikulum darurat juga efektif mengurangi indikasi learning-loss selama pandemi, baik dalam capaian literasi maupun numerasi.

Hasil positif ini menunjukkan bahwa intervensi kurikulum darurat berdampak signifikan dalam upaya pemulihan pembelajaran akibat pandemi Covid-19. Namun demikian, perlu diakui bahwa intervensi ini dirancang untuk

mengatasi potensi learning loss dan learning gap selama pandemi. Diperlukan pengembangan kurikulum yang komprehensif untuk menghadapi krisis pembelajaran yang menjadi masalah kritis di Indonesia. Dalam konteks ini, studi akademik tentang pemulihan pembelajaran disusun untuk mengeksplorasi berbagai alternatif kurikulum yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan dengan karakteristik yang beragam, guna meningkatkan kualitas proses pembelajaran, optimalisasi hasil belajar siswa, serta mengurangi dampak negatif pandemi Covid-19 terhadap pendidikan di Indonesia (Puskur Dikbud Ristek, 2021).

Mulai tahun 2022 hingga 2024, Kemendikbudristek menyediakan tiga opsi kurikulum yang dapat diadopsi oleh satuan pendidikan, yaitu kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum prototipe. Kurikulum darurat merupakan penyederhanaan dari kurikulum 2013 yang diterapkan sejak tahun 2020 selama pandemi Covid-19. Sementara itu, kurikulum prototipe didesain berbasis kompetensi untuk mendukung pemulihan pembelajaran dengan menerapkan pembelajaran berbasis proyek (Project Based Learning). Kurikulum Merdeka adalah nama baru untuk kurikulum prototipe yang secara resmi diperkenalkan oleh Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim. Kurikulum Merdeka Belajar merupakan evolusi dari kurikulum darurat yang diluncurkan sebagai respons terhadap dampak pandemi Covid-19.

Tabel 1.1. Sekolah Penggerak Tingkat SMA yang ada di Kabupaten Rokan Hilir

No	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah	NPSN	Kab/Kota	Angkatan
1	SMAN 1 BAGANSINE MBAH	Ahmad Sofian	10405546	Kab. Rokan Hilir	Angkatan 2
2	SMAN 2 PUJUD	Zaini	10493898	Kab. Rokan Hilir	Angkatan 2
3	SMAN 3 PUJUD	Agustina	69756576	Kab. Rokan Hilir	Angkatan 2

No	Nama Sekolah	Nama Kepala Sekolah	NPSN	Kab/Kota	Angkatan
4	SMAN 5 BAGAN SINEMBAH	Suzan Fadillah	69894224	Kab. Rokan Hilir	Angkatan 2
5	SMAN 1 BANGKO	Ismail Jabbar	10403241	Kab. Rokan Hilir	Angkatan 3
6	SMAN 5 PUJUD	Guswandi	10498608	Kab. Rokan Hilir	Angkatan 3

Sumber : Kemendikbudristek, 2022

Bagi satuan pendidikan yang ditunjuk sebagai Pelaksana Program Sekolah Penggerak dan Program Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, implementasi kurikulum mengacu pada Kurikulum Merdeka serta memperhatikan beban kerja guru dan konsistensi sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Panduan Penerapan Kurikulum untuk Pemulihan Pembelajaran. Program Sekolah Penggerak merupakan inisiatif Kemendikbudristek untuk mengakselerasi perkembangan sekolah-sekolah di Indonesia, baik negeri maupun swasta, menuju tingkat keunggulan. Program ini diluncurkan secara bertahap dari Angkatan I hingga Angkatan III dan mencakup 4.999 sekolah di 509 Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia, dengan 1.322 sekolah tingkat SMA terlibat secara nasional. Provinsi Riau memiliki 43 SMA Penggerak, sedangkan Kabupaten Rokan Hilir memiliki 6 sekolah yang termasuk dalam program ini.

Penelitian mengenai implementasi kebijakan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir mencakup berbagai aspek yang penting untuk pemahaman dan evaluasi. Alfaeni (2022) meneliti kesiapan guru dalam menerapkan Kurikulum Merdeka, sementara penelitian lebih lanjut akan memperluas fokusnya untuk menggali kesiapan seluruh sekolah termasuk kepala sekolah, guru, dan siswa. Aprilina (2019) menyelidiki peran kepemimpinan inovatif dalam konteks pendidikan yang

menyesuaikan dengan perkembangan zaman, dengan penelitiannya mendalam pada kepala sekolah yang dianggap kreatif dan inovatif dalam menerapkan Kurikulum Merdeka. Dwi Efiyanto (2021) menganalisis penerapan Kurikulum Merdeka di tingkat SMK secara umum, sementara fokus penelitiannya berikutnya akan lebih khusus pada implementasi di Sekolah Penggerak SMA di Kabupaten Rokan Hilir.

Implikasi keberhasilan implementasi kebijakan ini, sebagaimana ditegaskan oleh Fajarwati (2019), sangat dipengaruhi oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Karakteristik utama Kurikulum Merdeka, seperti pembelajaran berbasis proyek, fokus pada materi esensial, dan fleksibilitas bagi guru, dirancang untuk mendukung pemulihan pembelajaran dan telah diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan karakter siswa, memastikan kesetaraan dalam kualitas pendidikan, dan membangun ekosistem pendidikan yang kuat.

Menurut Subarsono (2011 dalam Pramono, 2020), keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Sementara itu, teori-teori lain oleh ahli seperti Edward III, Merilee S. Grindle, dan Daniel A. Mazmanian menekankan pentingnya isi kebijakan, lingkungan implementasi, dan karakteristik masalah dalam memastikan keberhasilan suatu kebijakan. Proses implementasi Kurikulum Merdeka ini juga terkait dengan digitalisasi sekolah yang meningkatkan efisiensi dan adaptasi terhadap perubahan zaman (Sumarsih et al., 2022). Tujuan spesifik dari implementasi Kurikulum Merdeka adalah memperkuat karakter Pancasila pada pelajar, meningkatkan kualitas pendidikan melalui kapasitas kepemimpinan yang baik di sekolah, membangun ekosistem pendidikan yang kolaboratif, serta

menciptakan kondisi yang mendukung berbagai pemangku kepentingan dalam pendidikan. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mengoptimalkan pembelajaran di tengah tantangan masa pandemi dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan di Indonesia (Zamjani dkk, 2021 dalam Syafi'i, 2021; Yuliah, 2020).

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan wawasan mendalam tentang implementasi Kurikulum Merdeka di Kabupaten Rokan Hilir, tetapi juga menyumbangkan informasi penting bagi pengembangan kebijakan dan praktek pendidikan yang lebih baik di masa depan.

METODE

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif (Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M., 2019) yang menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan analisis Grindle (2017). Metode deskriptif kualitatif digunakan untuk memahami fenomena sosial dalam konteks alami sebagai sumber data utama. Penelitian ini mengadopsi pendekatan deskriptif analitis, yang bertujuan untuk menjelaskan dan menganalisis tema yang diteliti, serta menggunakan instrumen penyebaran untuk secara rinci menggambarkan fenomena yang terjadi di lapangan dengan fokus pada interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diamati. Analisis Grindle dalam penelitian ini menitikberatkan pada Isi Kebijakan (Content Of Policy) dan Lingkungan Implementasi (Context Of Implementation).

Penelitian ini dilaksanakan di SMA Penggerak di Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, khususnya di SMAN 1 Bagansinembah dan SMAN 2 Pujud. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (purposive) (Lenaini, 2021), dimana kedua SMA negeri ini dipilih karena dapat diakses dengan mudah dan mewakili setiap kecamatan yang memiliki

sekolah penggerak di Kabupaten Rokan Hilir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir menunjukkan beberapa hal yang signifikan dalam upaya pemulihan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Program ini telah berhasil menyediakan alternatif kurikulum yang lebih fleksibel, dengan fokus utama pada pembelajaran berbasis proyek untuk mengembangkan soft skills dan karakter sesuai dengan profil pelajar Pancasila, yang sesuai dengan kebutuhan lokal dan karakteristik siswa di Rokan Hilir.

Selain itu, implementasi ini juga bertujuan untuk mengoptimalkan hasil belajar siswa dengan memusatkan perhatian pada materi esensial seperti literasi dan numerasi, yang penting dalam mengatasi learning loss selama pandemi. Namun demikian, masih terdapat hambatan yang perlu diatasi, seperti keterbatasan sumber daya yang mempengaruhi kemampuan sekolah dalam mengadopsi kurikulum ini sepenuhnya, serta tingkat kesiapan yang bervariasi di antara sekolah penggerak. Konteks sosial dan budaya lokal juga menjadi faktor kunci yang mempengaruhi integrasi nilai-nilai lokal dalam kurikulum yang bersifat universal. Dengan mengidentifikasi dan mengatasi tantangan ini secara efektif, diharapkan potensi Kurikulum Merdeka dapat dimaksimalkan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir.

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA Di Kabupaten Rokan Hilir

Tabel 1 Analisis data Kepentingan yang mempengaruhi (*Interested Effected*)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Target Kebijakan yang dilaksanakan oleh sekolah penggerak	1. Kepmendikbudristek RI No.262/M/2022 tentang perubahan atas Kepmendikbudristek No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. 2. Kepmendikbudristek No.371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak	1. Kepmendikbudristek RI No.262/M/2022 tentang perubahan atas Kepmendikbudristek No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. 2. Kepmendikbudristek No.371/M/2021 Tentang Program Sekolah Penggerak	1. Kepmendikbudristek RI No.262/M/2022 tentang perubahan atas Kepmendikbudristek No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran. 2. Permendikbud RI No.69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Kurikulum yang digunakan	Kurikulum Merdeka Mandiri berbagi dan Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka Mandiri berbagi dan Kurikulum 2013	Kurikulum Merdeka Mandiri berubah dan Kurikulum 2013

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir, seperti yang tergambar dari Tabel 1, menunjukkan komitmen yang signifikan dalam upaya pemulihan dan peningkatan kualitas pendidikan di daerah tersebut. Sekolah Penggerak seperti SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud mengambil langkah konkret dengan menerapkan Kepmendikbudristek RI No.262/M/2022 tentang pedoman penerapan Kurikulum

Merdeka dalam rangka pemulihan pembelajaran.

Meskipun keduanya menggunakan Kurikulum Merdeka Mandiri berbagi, mereka juga mempertahankan elemen-elemen dari Kurikulum 2013, mencerminkan pendekatan yang menggabungkan modernisasi pembelajaran dengan keberlanjutan program pendidikan sebelumnya. Perbandingan dengan SMAN 2 Bangko sebagai sekolah reguler menunjukkan bahwa Sekolah Penggerak lebih menonjol dalam menerapkan perubahan kurikulum baru ini. Meskipun demikian, tantangan dalam integrasi kurikulum baru dengan konteks lokal dan ketersediaan sumber daya masih menjadi fokus, menegaskan pentingnya dukungan terus-menerus untuk memaksimalkan potensi Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan mutu pendidikan di Rokan Hilir.

Tabel 2 Analisis data Tipe Manfaat (*Type Of Benefits*)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Manfaat kurikulum terhadap sekolah	1) Melaksanakan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), 2) Pembelajaran paradigma baru, 3) Pembelajaran berpihak pada murid, 4) Memberikan keleluasaan pada pendidik menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik	1) Melaksanakan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), 2) Pembelajaran paradigma baru, 3) Pembelajaran berpihak pada murid, 4) Memberikan keleluasaan pada pendidik menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar peserta didik	Melaksanakan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila) namun masih belum maksimal karena keterbatasan SMA yang memahaminya.
Manfaat kurikulum terhadap masyarakat	1. Anak menjadi mandiri 2. Keterlibatan orang	1. Anak menjadi mandiri	Anak mulai belajar mandiri

	tua secara aktif	2. Keterlibatan orang tua secara aktif	
--	------------------	--	--

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 2 memberikan gambaran tentang manfaat yang dihasilkan dari implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir. Sekolah seperti SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud secara konsisten melaporkan manfaat yang serupa, termasuk pelaksanaan P5 (Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila), pengenalan paradigma baru dalam pembelajaran, pendekatan yang lebih berpihak pada murid, serta fleksibilitas bagi pendidik untuk menciptakan pembelajaran berkualitas sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan belajar siswa.

Di sisi lain, meskipun SMAN 2 Bangko juga melaksanakan P5, implementasinya belum optimal karena keterbatasan pemahaman di sebagian SMA yang ada. Manfaat kurikulum terhadap masyarakat, seperti kemandirian anak dan keterlibatan aktif orang tua, juga tercatat sebagai hasil positif dari adopsi Kurikulum Merdeka, meskipun perbedaan dalam tingkat keterlibatan tersebut mungkin terlihat antara sekolah penggerak dan sekolah reguler. Analisis ini menyoroti pentingnya mendukung sekolah dalam memahami dan mengimplementasikan secara menyeluruh agar manfaat yang diharapkan dari Kurikulum Merdeka dapat maksimal dirasakan oleh seluruh komunitas pendidikan dan masyarakat setempat.

Tabel 3 Analisis Data Derajat Perubahan yang Ingin Dicapai (*Extend of Chance Ervission*)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Peningkatan mutu pendidikan	Soft Skill	Soft Skill	Hard Skill
Perubahan untuk peserta didik	Mandiri Berbagi	Mandiri Berbagi	Mandiri Berubah

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Penilaian Pembelajaran	penilaian yang digunakan adalah sistem penilaian holistik. Sistem penilaian ini ditentukan sebelum dimulainya proses pembelajaran.	penilaian yang digunakan adalah sistem penilaian holistik. Sistem penilaian ini ditentukan sebelum dimulainya proses pembelajaran.	Penilaian Pembelajaran didasarkan pada hasil belajar dan proses para peserta didik (penilaian otentik).
Hasil Belajar	Pada sekolah penggerak, hasil belajar para siswa-siswi didasarkan pada perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan setiap siswa-siswi. Sehingga para siswa-siswi bisa mempelajari beberapa sumber belajar tanpa harus melihat kegunaannya di tingkatan tertentu.	Pada sekolah penggerak, hasil belajar para siswa-siswi didasarkan pada perkembangan, kebutuhan, dan kemampuan setiap siswa-siswi. Sehingga para siswa-siswi bisa mempelajari beberapa sumber belajar tanpa harus melihat kegunaannya di tingkatan tertentu.	Hasil belajar para siswa-siswi di kurikulum 2013 dibagi berdasarkan <i>level</i> atau tingkatan kelas.

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 3 mengungkapkan derajat perubahan yang diharapkan dari implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir. SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud, sebagai sekolah penggerak, menunjukkan fokus yang konsisten pada peningkatan soft skill siswa melalui pendekatan mandiri dan berbagi dalam pembelajaran. Mereka menggunakan sistem penilaian holistik yang telah ditetapkan sebelum proses pembelajaran dimulai, menekankan pada perkembangan individu dan kemampuan siswa.

Di sisi lain, SMAN 2 Bangko, sebagai sekolah reguler dengan Kurikulum 2013, lebih menitikberatkan pada pengembangan hard skill dan menggunakan penilaian pembelajaran berdasarkan level atau tingkatan kelas. Analisis ini menyoroti perbedaan pendekatan dalam menilai hasil belajar siswa antara Kurikulum Merdeka dan Kurikulum 2013, serta implikasi dari setiap pendekatan terhadap kualitas pendidikan dan kesiapan siswa menghadapi tantangan masa depan.

Tabel 4 Analisis Data Letak Pengambilan Keputusan (Site of Decision Making)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Ketepatan kebijakan/kurikulum	Kepmendik budristek No.262/M/2022 tentang Perubahan Kepmendik budristek No. RI No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran n.	Kepmendik budristek No.262/M/2022 tentang Perubahan Kepmendik budristek No. RI No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran n.	1.Kepmendik budristek No.262/M/2022 tentang Perubahan Kepmendik budristek No. RI No.56/M/2022 Tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran n. 2.Permendikbud RI No.69 Tahun 2013 Tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah
Ketepatan sasaran kebijakan	Stakeholder	Stakeholder	Stakeholder

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 4 membahas letak pengambilan keputusan terkait implementasi Kurikulum Merdeka di SMA Penggerak di Kabupaten Rokan Hilir.

SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud, kedua sekolah penggerak, menunjukkan konsistensi dalam mengadopsi Kepmendikbudristek No. 262/M/2022 yang mengatur tentang perubahan dan pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kedua sekolah ini memilih kebijakan yang sesuai dengan tujuan Kurikulum Merdeka, menunjukkan ketepatan dalam menyesuaikan sasaran kebijakan dengan kebutuhan stakeholder di lingkungan sekolah.

Di sisi lain, SMAN 2 Bangko, sebagai sekolah reguler, juga menerapkan kebijakan yang sama terkait Kurikulum 2013 dengan mengacu pada Permendikbud RI No. 69 Tahun 2013, namun belum sepenuhnya mengikuti arah yang diarahkan oleh Kurikulum Merdeka. Analisis ini menunjukkan pentingnya konsistensi dan ketepatan dalam memilih kebijakan serta pedoman yang mendukung implementasi Kurikulum Merdeka untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan pemulihan dan peningkatan mutu pendidikan di Rokan Hilir.

Tabel 5 Tabel Analisis Data Pelaksanaan Program (Program Implementer)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Struktur organisasi pelaksana	Kepala Satuan Pendidik, Guru, Pemerintah	Kepala Satuan Pendidik, Guru, Pemerintah	Kepala Satuan Pendidik, Guru, Pemerintah
Penerima Program	Siswa, Masyarakat	Siswa, Masyarakat	Siswa, Masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 5.5 memperlihatkan analisis pelaksanaan program di Sekolah Penggerak dan sekolah reguler di Kabupaten Rokan Hilir. SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud, kedua sekolah penggerak, menunjukkan bahwa struktur organisasi pelaksana program melibatkan kepala satuan pendidik, guru, dan pemerintah dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Mereka juga menargetkan penerima program dari siswa dan masyarakat, menunjukkan bahwa program ini dirancang untuk memberikan manfaat tidak hanya kepada peserta didik tetapi juga lingkungan sekitar sekolah. Sementara itu, SMAN 2 Bangko, sebagai sekolah reguler, memiliki struktur organisasi pelaksana yang serupa dan juga menargetkan siswa dan masyarakat sebagai penerima program, meskipun implementasinya masih mengikuti Kurikulum 2013. Analisis ini menegaskan bahwa partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam struktur sekolah adalah krusial dalam menjalankan program pendidikan yang berdampak luas seperti Kurikulum Merdeka di tingkat lokal.

Tabel 6 Analisis Data Sumber-Sumber Daya yang digunakan (*Resources Committed*)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Guru Penggerak	2 orang	3 Orang	5 orang
Sumber Anggaran	Dana Bos Reguler dan Dana Bos Kinerja	Dana Bos Reguler dan Dana Bos Kinerja	Dana Bos Reguler
Sarana dan prasarana untuk melakukan kegiatan pengajaran kurikulum merdeka	Bangunan, Perangkat Ajar	Bangunan, Perangkat Ajar	Bangunan, Perangkat Ajar

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 6 menggambarkan analisis sumber daya yang digunakan dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak dan sekolah reguler di Kabupaten Rokan Hilir. SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud, kedua sekolah penggerak, memiliki perbedaan dalam alokasi sumber daya untuk guru penggerak, dengan SMAN 1 memiliki 2 orang guru penggerak dan SMAN 2 memiliki 3 orang. Sementara itu, SMAN 2 Bangko, sebagai sekolah reguler, memiliki 5 orang guru yang terlibat dalam implementasi Kurikulum 2013. Dalam hal sumber anggaran, SMAN 1 Bagan

Sinembah dan SMAN 2 Pujud menggunakan dana Bos Reguler dan dana Bos Kinerja untuk mendukung kegiatan pembelajaran Kurikulum Merdeka. Sedangkan SMAN 2 Bangko hanya menggunakan dana Bos Reguler, menunjukkan perbedaan dalam alokasi dana antara sekolah penggerak dan reguler. Untuk sarana dan prasarana kegiatan pengajaran Kurikulum Merdeka, ketiga sekolah menggunakan bangunan dan perangkat ajar sebagai sumber daya utama. Analisis ini menyoroti pentingnya alokasi sumber daya yang memadai untuk mendukung pelaksanaan kurikulum yang berorientasi pada inovasi dan peningkatan kualitas pendidikan di tingkat lokal.

Tabel 7 Analisis Data Kekuasaan, Kepentingan-kepentingan dan Strategi dari Aktor yang terlibat (*Power, Interest, and Strategy of Actor Involved*)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Kewenangan dalam melaksanakan program/kurikulum	Kepala Satuan Pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan	Kepala Satuan Pendidikan
Pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan kurikulum merdeka	Kemendikbudristek Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan Masyarakat	Kemendikbudristek Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan Masyarakat	Kemendikbudristek Dinas Pendidikan Satuan Pendidikan Masyarakat
Strategi yang dilakukan pelaksana kurikulum	1. Alokasi Anggaran Secara Maksimal 2. Pelatihan Tenaga Pengajar secara berkelanjutan 3. Keterlibatan Orang tua aktif	1. Alokasi Anggaran Secara Maksimal 2. Pelatihan Tenaga Pengajar secara berkelanjutan 3. Keterlibatan Orang tua aktif	1. Alokasi Anggaran Secara Maksimal

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 7 menyajikan analisis kekuasaan, kepentingan, dan strategi dari aktor yang terlibat dalam pelaksanaan

Sumartono, Febri Yuliani, Zulkarnaini: Implementasi Kebijakan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Penggerak Tingkat Sma Di Kabupaten Rokan Hilir

Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Bagan Sinembah, SMAN 2 Pujud (keduanya sekolah penggerak), dan SMAN 2 Bangko (sekolah reguler) di Kabupaten Rokan Hilir. Kewenangan untuk melaksanakan program/kurikulum dimiliki oleh kepala satuan pendidikan di ketiga sekolah tersebut, menunjukkan peran utama kepemimpinan sekolah dalam mengimplementasikan kebijakan pendidikan. Pihak-pihak yang memiliki kepentingan dalam pelaksanaan Kurikulum Merdeka meliputi Kemendikbudristek, Dinas Pendidikan, satuan pendidikan, dan masyarakat umum. Semua pihak ini memiliki peran dalam mendukung implementasi kurikulum yang berfokus pada pemulihan pembelajaran dan peningkatan mutu pendidikan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Strategi yang dilakukan oleh pelaksana kurikulum di ketiga sekolah meliputi alokasi anggaran secara maksimal, pelatihan tenaga pengajar secara berkelanjutan, dan keterlibatan orang tua secara aktif. Hal ini menunjukkan upaya untuk memaksimalkan efektivitas implementasi kurikulum dengan mendukung aspek keuangan, pengembangan profesional guru, dan partisipasi aktif dari orang tua dalam proses pendidikan. Analisis ini memperlihatkan pentingnya koordinasi antaraktor serta strategi yang terencana dengan baik untuk memastikan kesuksesan dan keberlanjutan dari Kurikulum Merdeka di lingkungan pendidikan setempat.

Tabel 8 Analisis Data Karakteristik Lembaga dan Rezim yang Berkuasa (*Institution and Regime Characteristic*)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Lembaga lain yang terlibat	Lembaga-Lembaga Masyarakat	Lembaga-Lembaga Masyarakat	Tidak ada
Pengaruh dari Rezim	Perubahan Menteri Pendidikan yang dapat	Perubahan Menteri Pendidikan yang dapat	Perubahan Menteri Pendidikan yang dapat

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
yang berkuasa	merubah kurikulum	merubah kurikulum	merubah kurikulum

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 8 menyajikan analisis karakteristik lembaga dan pengaruh rezim yang berkuasa dalam konteks implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud (keduanya sekolah penggerak) serta SMAN 2 Bangko (sekolah reguler) di Kabupaten Rokan Hilir. Lembaga lain yang terlibat dalam implementasi kurikulum meliputi lembaga-lembaga masyarakat di SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud, sedangkan SMAN 2 Bangko tidak melibatkan lembaga masyarakat dalam konteks ini.

Pengaruh dari rezim yang berkuasa, terutama dalam bentuk perubahan Menteri Pendidikan yang dapat mengubah kurikulum, menjadi faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam kontinuitas dan adaptasi kurikulum di tingkat sekolah. Hal ini menunjukkan sensitivitas terhadap kebijakan nasional dalam pengelolaan pendidikan di setiap sekolah, yang perlu diakomodasi agar implementasi kurikulum dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Tabel 9 Analisis Data Tingkat Kepatuhan dan Respon dari Pelaksana (*Compliance and Responsiveness*)

Dimensi	Sekolah Penggerak SMAN 1 Bagan Sinembah	Sekolah Penggerak SMAN 2 Pujud	Sekolah Reguler SMAN 2 Bangko
Melaksanakan kebijakan sesuai peraturan	Menjalankan kurikulum merdeka pada seluruh elemen satuan pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan	Menjalankan kurikulum merdeka pada seluruh elemen satuan pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan	Menjalankan kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka pada seluruh elemen satuan pendidikan sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan

Konsistensi dalam pelaksanaan	1 Tahun Ajar	1 Tahun Ajar	1 Tahun Ajar
-------------------------------	--------------	--------------	--------------

Sumber: Olahan Peneliti, 2023

Tabel 5.9 menggambarkan analisis tingkat kepatuhan dan responsivitas dari pelaksana dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud (keduanya sekolah penggerak) serta SMAN 2 Bangko (sekolah reguler) di Kabupaten Rokan Hilir. Ketiga sekolah menunjukkan konsistensi dalam melaksanakan kebijakan kurikulum sesuai dengan Keputusan Menteri Pendidikan, meskipun dengan kurikulum yang berbeda: SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud dengan Kurikulum Merdeka, sementara SMAN 2 Bangko menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. Konsistensi pelaksanaan ini dilakukan selama satu tahun ajaran, mencerminkan upaya dalam menjaga ketertiban dalam proses pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hambatan Dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA Di Kabupaten Rokan Hilir.

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka di SMA di Kabupaten Rokan Hilir, terdapat beberapa hambatan yang signifikan. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya jumlah dan ketersediaan guru penggerak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekolah penggerak maupun sekolah reguler mengalami kesulitan dalam menarik dan mempertahankan jumlah guru penggerak yang memadai. Contohnya, di SMAN 1 Bagan Sinembah dan SMAN 2 Pujud, terlihat bahwa hanya sedikit guru yang bersedia atau mampu memenuhi syarat menjadi guru penggerak, yang sangat dibutuhkan untuk mengimplementasikan kurikulum dengan baik. Bahkan, Bapak Zaini dari SMAN 2 Pujud mengungkapkan bahwa proses seleksi guru penggerak yang

sulit menjadi salah satu alasan minimnya jumlah guru penggerak di sekolahnya.

Di sisi lain, di SMAN 2 Bangko yang menggunakan Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka, Ibu Norazizah mengungkapkan bahwa kendala serupa terjadi di sekolah reguler, di mana banyak guru yang tidak tertarik atau tidak siap untuk menjadi guru penggerak. Keterbatasan ini menghambat kemampuan sekolah untuk mengadopsi dan mengintegrasikan kurikulum baru dengan efektif.

Secara keseluruhan, kurangnya jumlah dan ketersediaan guru penggerak menjadi hambatan krusial dalam implementasi Kurikulum Merdeka di Rokan Hilir. Hal ini menandakan perlunya upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesiapan guru terhadap kurikulum baru serta meningkatkan insentif atau dukungan bagi guru yang bersedia menjadi penggerak kurikulum. Penanganan hambatan ini dapat membantu meningkatkan kualitas pendidikan dan kesesuaian pelaksanaan kurikulum dengan kebutuhan dan standar yang ditetapkan.

Berikut adalah rangkuman dari hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir:

1. Kurangnya Jumlah Guru Penggerak: Salah satu hambatan utama adalah minimnya jumlah guru penggerak yang tersedia di sekolah-sekolah. Guru penggerak ini memiliki peran penting dalam memahami dan mengimplementasikan Kurikulum Merdeka. Tidak semua guru bersedia atau memenuhi syarat untuk menjadi guru penggerak, yang menyebabkan sekolah kesulitan dalam melaksanakan kurikulum dengan efektif.

2. Minimnya Literasi dan Pengetahuan Guru Penggerak: Guru-guru, baik yang menjadi penggerak maupun tidak, menghadapi tantangan dalam memahami dan menggunakan teknologi informasi untuk mendukung Kurikulum Merdeka. Banyak dari mereka masih memiliki keterbatasan dalam literasi digital dan memanfaatkan platform seperti PMM (Merdeka Mengajar). Ini mempengaruhi kemampuan mereka untuk mengembangkan dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis digital.
3. Minimnya Fasilitas Sekolah: Kelengkapan fasilitas sekolah, seperti ruang ajar yang memadai, laboratorium, dan akses internet yang lancar, juga menjadi kendala dalam implementasi Kurikulum Merdeka. Sekolah terkadang menghadapi masalah dengan fasilitas yang tidak memadai atau rusak, yang menghambat proses pembelajaran yang berbasis teknologi dan memenuhi standar kurikulum yang diinginkan.

Hambatan-hambatan ini menunjukkan perlunya dukungan tambahan baik dari pemerintah maupun komunitas pendidikan untuk meningkatkan jumlah guru penggerak, meningkatkan literasi digital guru, serta memperbaiki fasilitas sekolah. Dengan penanganan yang tepat, implementasi Kurikulum Merdeka dapat lebih berhasil dan sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis hambatan dalam mengimplementasikan Kurikulum Merdeka pada Sekolah Penggerak Tingkat SMA di Kabupaten Rokan Hilir, dapat disimpulkan bahwa kurangnya jumlah dan kualitas guru penggerak menjadi salah satu hambatan utama. Guru penggerak memiliki peran vital dalam memahami dan mengimplementasikan Kurikulum

Merdeka, namun minimnya mereka mengakibatkan kesulitan dalam menjalankan kurikulum secara efektif. Selain itu, tantangan literasi digital dan pemanfaatan teknologi informasi oleh guru-guru juga memperlambat adaptasi terhadap kurikulum yang berbasis digital seperti PMM (Merdeka Mengajar).

Selain itu, keterbatasan fasilitas sekolah seperti ruang kelas yang rusak, minimnya laboratorium, dan akses internet yang tidak memadai menjadi penghambat utama dalam menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan kurikulum yang diinginkan. Untuk meningkatkan implementasi Kurikulum Merdeka di sekolah-sekolah ini, diperlukan langkah-langkah strategis seperti peningkatan jumlah dan kualitas guru penggerak, pelatihan intensif dalam literasi digital bagi seluruh guru, serta perbaikan atau penambahan fasilitas sekolah yang mendukung pembelajaran berbasis teknologi. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini, diharapkan kurikulum dapat dijalankan dengan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan pendidikan nasional yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Efyanto, D. (2021). *Analisis Penerapan Kebijakan Merdeka Belajar Pada Kurikulum SMK* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Malang).
- Aprilina, R. G. (2019). Prosiding Seminar Nasional Pendidikan 2019 "Impressive Emphatic dalam Edifikasi Kepemimpinan Inovatif Menyongsong Era 5.0." *Implementasi Peran Kepemimpinan Pendidikan Yang Inovatif Dalam Menyesuaikan Perkembangan Zaman*, 237–240.
- Fajarwati, A., & Rahmadilla, U. (2022). Model Implementasi Kebijakan Merilee Grindle. *Dialog*, 7(1), 123-133.

- Fauzi, A. (2022). Implementasi kurikulum merdeka di sekolah penggerak. *Jurnal Pahlawan/ Vol, 18(2)*.
- H. Tachjan. (2006). *Implementasi Kebijakan Publik* (C. P. Dede Mariana (ed.); 1st ed.). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) Bandung bekerjasama dengan Puslit KP2W Lembaga Penelitian Unpad.
- Jojob, A., & Sihotang, H. (2022). Analisis kurikulum merdeka dalam mengatasi learning loss di masa pandemi Covid-19 (analisis studi kasus kebijakan pendidikan). *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan, 4(4)*, 5150-5161.
- Pramono, J. (2020). *Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik*. In Sutoyo (Ed.), *Kebijakan Publik* (1st ed.). UNISRI Press Redaksi
- Puskur Dikbud Ristek. (2021). *Kurikulum Untuk Pemulihan Pembelajaran*. In *Kajian Akademik* (1st ed., p. 130). Pusat Kurikulum dan Pembelajaran Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
- Sari, R. M. (2019). Analisis Kebijakan Merdeka Belajar Sebagai Strategi Peningkatan Mutu Pendidikan. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1)*, 38–50. <https://doi.org/10.15548/p-prokurasi.v1i1.3326>
- Suhartono, O. (2021). Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam. *Ar-Rosikhun: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1(1)*, 8–19. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/alrosikhun/indexPage%7C8>
- Sumarsih, I., Marliyani, T., Hadiyansah, Y., Hernawan, A. H., & Prihantini, P. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Sekolah Penggerak Sekolah Dasar. *Jurnal Basicedu, 6(5)*, 8248–8258. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v6i5.3216>
- Syafi'i, F. F. (2021). *Merdeka belajar: sekolah penggerak*. Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Dasar “Merdeka Belajar Dalam Menyambut Era Masyarakat 5.0,” November, 46–47.
- Yuliah, E. 2020. Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies. *At-Tadbir: Media Hukum Dan Pendidikan, 30*, 129–153.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah, 6(1)*, 33-39.
- Kemendikbudristek, 2022. *Salinan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran*. Kemendikbudristek (pp. 1–33).
- Grindle, M. S. (2017). Politics and policy implementation in the Third World.
- Kusumastuti, A., & Khoiron, A. M. (2019). *Metode penelitian kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Peraturan:**
- Kemendikbudristek, (2022). *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Kemendikbudristek (pp. 1–16).

- Kemendikbudristek, (2022). *Salinan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Standar Isi Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Kemendikbudristek (pp. 1–72).
- Kemendikbudristek BSKAP, (2022). *Salinan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 008/H/KR/2022 Tentang Capaian Pembelajaran Pada Pendidikan Anak Usia Dini Jenjang Pendidikan Dasar dan Jenjang Pendidikan Menengah*. Kemendikbudristek BSKAP RI (pp. 1–384).
- Kemendikbudristek BSKAP, (2022). *Salinan Keputusan Kepala Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 009/H/KR/2022 Tentang Dimensi, Elemen, dan Sebelemen Profil Pelajar Pancasila Pada Kurikulum Merdeka*. Kemendikbudristek BSKAP RI (pp. 1–35).
- Kemendikbudristek, (2022). *Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Nomor 0301/C/HK.00/2022 Tentang Penetapan Satuan Pendidikan Pelaksana Program Sekolah Penggerak Angkatan II dalam lampiran IV*. Dirjen PAUD, DIKDAS, DIKMEN (pp. 1-82).